



**LAPORAN KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH  
2021**

**KECAMATAN TOMONI**

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Kondisi Geografis.....	2
1.2 Data Umum Organisasi .....	3
1.3 Struktur/Kondisi Organisasi .....	6
1.4 Peran Organisasi .....	7
1.5 Isu Strategis .....	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA .....	9
2.1 Rencana Strategis 2021-2026.....	9
2.2 Perencanaan Kinerja Tahun 2021 .....	Error! Bookmark not defined.11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	17
3.1 Capaian Kinerja Organisasi .....	17
<b>Sasaran 1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kec. Tomoni ....</b>	<b>18</b>
1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021 .....	18
2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2020 dan Beberapa Tahun Terakhir.....	20
3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi .....	20
4. Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.....	21
5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	22
6. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.....	22
<b>Sasaran 2. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Kecamatan Tomoni....</b>	<b>309</b>
1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2021 .....	309
2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2020 dan Beberapa Tahun Terakhir.....	30
3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi .....	31
4. Analisis penyebab keberhasilan dan kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan. ....	32
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya .....	33
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.....	33

<b>3.2 Realisasi Anggaran .....</b>	<b>41</b>
BAB IV_PENUTUP.....	46
LAMPIRAN – LAMPIRAN .....	50

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah ASN Berdasarkan Golongan .....	3
Tabel 1.2 Jumlah ASN Berdasarkan Pendidikan .....	4
Tabel 1.3 Jumlah ASN Berdasarkan Jabatan .....	4
Tabel 1.4 Jumlah ASN Berdasarkan Status Kepegawaian .....	5
Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2020.....	12
Tabel 2.2 APBD Perubahan Tahun 2020 .....	13
Tabel 3.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Tahun ini.....	17
Tabel 3.2 Perbandingan Target dan Realisasi dengan Tahun-Tahun Sebelumnya .....	19
Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Terhadap Target Jangka Menengah.....	21
Tabel 3.4 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Tahun ini.....	29
Tabel 3.5 Perbandingan Target dan Realisasi dengan Tahun-Tahun Sebelumnya .....	30
Tabel 3.6 Perbandingan Capaian Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Terhadap Target Jangka Menengah ( Renstra 2016-2021) .....	32
Tabel 3.7 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya .....	33
Tabel 3.8 Realisasi Anggaran Tahun 2020.....	41

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan Syukur serta Alhamdulillah atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa kami ucapkan, sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Kecamatan Tomoni dapat kami selesaikan.

Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi setiap instansi pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat sesuai peraturan yang berlaku. Hal yang paling utama dalam penyusunan LAKIP ini merupakan suatu bentuk pertanggung jawaban dari tugas pokok, fungsi dan kewenangan yang telah menjadi tanggung jawab Kecamatan Tomoni sebagai sarana umpan balik untuk selalu melakukan perbaikan dalam perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan.

Kami sangat menyadari dalam penyusunan LAKIP ini masih terdapat banyak kekurangan baik dalam penyampaian isi materi maupun teknik penulisannya, oleh karena itu kami tidak menutup diri untuk menerima perbaikan, kritik dan saran yang membangun dari semua pihak guna penyempurnaannya. Akhirnya kami berharap semoga LAKIP Kecamatan Tomoni Tahun 2021 ini dapat berguna bagi semua pihak dan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk perbaikan dimasa yang akan datang.

Tomoni,      Februari 2022

CAMAT TOMONI

**CATUR DYAN SINTAWATI, SE.,MM**

NIP. 19750901 200312 2006

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

---

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan pelaksanaan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan akuntabilitas Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Untuk mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Tomoni selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah dituntut untuk meningkatkan kinerja. Peningkatan kinerja diharapkan mampu menghadirkan pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel. Adapun tujuan pelaporan kinerja adalah Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target yang diharapkan dengan realisasi yang terjadi. Pengukuran dan perbandingan kinerja dalam laporan kinerja menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Luwu Timur, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan kabupaten, provinsi dan pusat.

Untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Tentu harapan tersebut perlu pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimasi sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil, bersih dan dapat dipertanggungjawabkan serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan akuntabel di Kecamatan Tomoni diperlukan penerapan *good governance*. Dimana terselenggaranya *good governance* merupakan persyaratan utama dalam mewujudkan pemerintahan yang aspiratif, mengutamakan kepentingan rakyat banyak dan berkeadilan.

Sebagai media pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan melaksanakan misi organisasi, Kecamatan Tomoni menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2021 dalam upaya mewujudkan *good governance* yang dicita-citakan yang mempunyai pilar-pilar transparansi, partisipasi dan akuntabilitas.

### **1.1 Kondisi Geografis**

Luas wilayah Kecamatan Tomoni 230,09 km<sup>2</sup> atau sekitar 3,31 persen dari total luas wilayah Kabupaten Luwu Timur. Kecamatan Tomoni terdiri dari 12 (duabelas) Desa definitif dan 1 (satu) Kelurahan, dengan 52 dusun/lingkungan dan 117 RT. Adapun Desa/Kelurahan dimaksud masing-masing :

1. Kelurahan Tomoni
2. Desa Lestari
3. Desa Mulyasri

4. Desa Bayondo
5. Desa Beringin Jaya
6. Desa Kalpataru
7. Desa Tadulako
8. Desa Sumber Alam
9. Desa Ujung Baru
10. Desa Mandiri
11. Desa Bangun Jaya
12. Desa Bangun Karya
13. Desa Rante Mario

Jumlah Penduduk Kecamatan Tomoni pada tahun 2020 sebanyak 25.669 jiwa (Laporan Penduduk Per Desember 2020) dengan rincian : laki-laki sebanyak 12.922 jiwa dan perempuan sebanyak 12.747 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 7.216 KK. Penduduk Kecamatan Tomoni merupakan penduduk yang heterogen baik Suku maupun Agama. Adapun Suku dan Agama di Kecamatan Tomoni yaitu Suku Jawa, Bali, Lombok, Batak, Bugis, Toraja, Pamona dan Agama Islam, Kristen dan Hindu.

## **1.2 Data Umum Organisasi**

Secara keseluruhan keadaan dan jumlah Aparatur di Kantor Kecamatan Tomoni dan Kantor Kelurahan Tomoni per tanggal 31 Desember 2021 adalah 28 (dua puluh delapan) orang PNS dan 23 (dua puluh tiga) orang Non PNS dengan rincian sebagai berikut :

1. Berdasarkan Golongan

Tabel 1.1  
Jumlah ASN Berdasarkan Golongan

NO.	GOLONGAN	RUANG				JUMLAH
		A	B	C	D	
1	Golongan IV	2	-	-	-	2
2	Golongan III	7	3	2	1	13
3	Golongan II	-	-	6	7	13
4	Golongan I	-	-	-	-	-
<b>JUMLAH</b>		<b>9</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>28</b>

Sumber : Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian

2. Berdasarkan Pendidikan

Tabel 1.2  
Jumlah ASN Berdasarkan Pendidikan

NO.	GOLONGAN	JENJANG PENDIDIKAN				JUMLAH
		S2	S1/D4	D2/D3	SMA/SMP	
1	Golongan IV	1	1	-	-	2
2	Golongan III	-	11	2	-	13
3	Golongan II	-	1	-	12	13
4	Golongan I	-	-	-	-	-
<b>JUMLAH</b>		<b>1</b>	<b>13</b>	<b>2</b>	<b>12</b>	<b>28</b>

Sumber : Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian

### 3. Berdasarkan Jabatan

**Tabel 1.3**  
**Jumlah ASN Berdasarkan Jabatan**

NO.	JABATAN	ESELON				JUMLAH
		II.B	III.A/B	IV.A/B	NON ESELON	
1	Struktural	-	2	8	18	28
2	Fungsional	-	-	-	-	-
3	Fungsional Umum	-	-	-	-	-
<b>JUMLAH</b>		-	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>18</b>	<b>28</b>

Sumber : Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian

### 4. Berdasarkan Status Kepegawaian

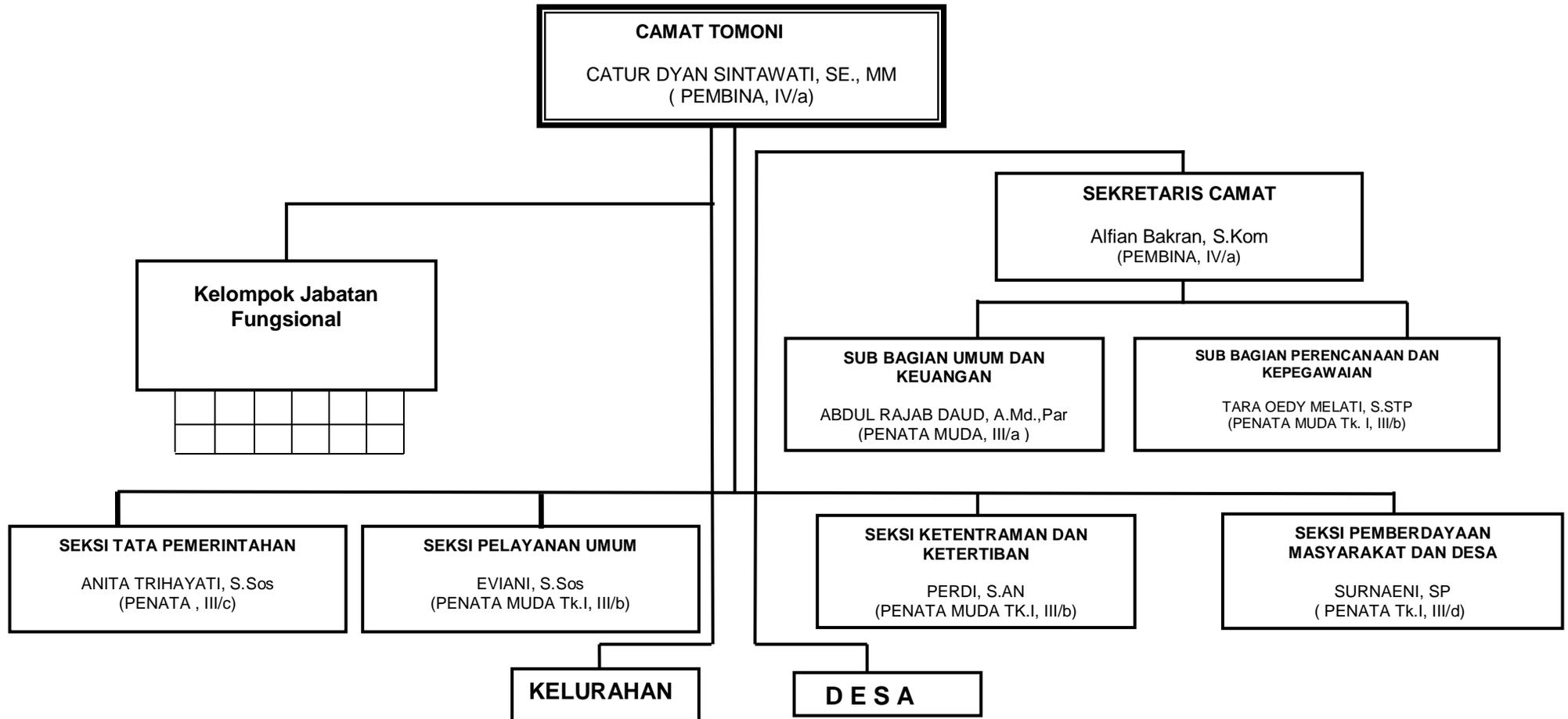
**Tabel 1.4**  
**Jumlah ASN Berdasarkan Status Kepegawaian**

NO.	STATUS KEPEGAWAIN	JUMLAH
1	PNS	28
2	CPNS	-
3	PTT	-
4	UPAH JASA	23
<b>JUMLAH</b>		<b>51</b>

Sumber : Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian

### 1.3. Struktur/Kondisi Organisasi

#### STRUKTUR ORGANISASI KANTOR KECAMATAN TOMONI



#### **1.4. Peran Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 08 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur dan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Luwu Timur. Organisasi Kecamatan merupakan satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai peran sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan di wilayah kecamatan yang menjadi kewenangan daerah. Satuan kerja perangkat daerah kecamatan dipimpin oleh Camat yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### **1.5. Isu Strategis**

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan Pemerintah Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur dituntut lebih transparan, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi ke depan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan lebih tepat sasaran. Untuk itu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan komprehensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah. Adapun isu-isu yang akan dihadapi Kecamatan Tomoni tidak terlepas dari permasalahan dan isu pembangunan Kabupaten Luwu Timur antara lain :

1. Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima
2. Adanya tuntutan akuntabilitas tata kelola pemerintahan

Isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif sebagaimana disebutkan dalam Renstra Kecamatan Tomoni yang mencakup strategi kebijakan program dan kegiatan. Implikasi terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur sebagai berikut :

1. Membangun sistem pelayanan prima yang cepat, tepat, efisien dan transparan
2. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan tupoksi (tugas pokok dan fungsi) untuk mewujudkan akuntabilitas
3. Menetapkan kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat

Memperhatikan isu-isu yang dipermasalahkan diatas terkait pelayanan kepada masyarakat,diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan mampu mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik.

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

---

#### 2.1. Rencana Strategis Tahun 2021-2026

Renstra SKPD adalah suatu dokumen Perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan sehubungan dengan tugas dan fungsi SKPD dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis, yang akan menjadi acuan dalam penilaian kinerja SKPD oleh lembaga auditor baik internal ataupun eksternal. Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu Rencana Strategis yang setidaknya memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Indikator Kinerja Program, Strategi Pembangunan, Kebijakan, Program dan Sasaran serta ukuran keberhasilan dalam pelaksanaannya. Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, penyusunan Rencana Strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar dalam 5 tahun ke depan mampu menjawab tuntutan lingkungan stratejik lokal, nasional dan global, namun berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui pendekatan Rencana Strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah dapat lebih menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kinerjanya. Rencana Strategis Kecamatan Tomoni Tahun 2021-2026 ditetapkan dengan maksud memberikan arah sekaligus menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan baik bagi pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha di dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah yang

berkesinambungan. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dimaksudkan untuk :

1. Menyediakan dokumen perencanaan untuk 5 (lima) tahun mendatang (2021-2026), yang selanjutnya akan menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT).
2. Menyediakan pedoman dan landasan dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi perangkat kecamatan dan kelurahan secara terfokus dan berdasarkan prioritas kebutuhan.
3. Menyediakan instrumen yang dapat digunakan oleh pimpinan untuk mengarahkan pegawai dan mengalokasikan sumber daya secara optimal dalam pencapaian tujuan organisasi.
4. Menyediakan instrumen awal untuk pengukuran pencapaian kinerja yang akan digunakan oleh pemangku kepentingan dalam rangka menilai kinerja Kecamatan Tomoni.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) adalah untuk :

1. Menciptakan keterpaduan langkah bagi seluruh unit kerja yang ada dalam melaksanakan tugas serta kegiatan yang telah disepakati.
2. Meningkatkan efektivitas tercapainya tujuan dan sasaran organisasi melalui kesungguhan dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

#### ❖ **Visi dan Misi**

Pada dasarnya, rencana Strategis (Renstra) OPD harus berpedoman pada Visi dan Misi Kabupaten Luwu Timur, agar pencapaian tujuan dalam pembangunan daerah terdapat sinkronisasi. Berkaitan dengan hal tersebut, maka Visi dan Misi Kecamatan Tomoni sesuai dengan RPJMD Kabupaten Luwu Timur. Adapun Visi dan Misi Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 adalah :

## **“Luwu Timur Berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya”**

Sebagai penjabaran visi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur diatas disusunlah misi yaitu rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang ingin dicapai dalam pembangunan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016–2021 dengan rincian sebagai berikut :

1. Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh;
2. Mengembangkan ekonomi daerah yang berdaya saing dan berjaringan luas;
3. Menyediakan infrastruktur daerah yang memadai dan lingkungan yang berkualitas;
4. Menciptakan pemerintahan dan pelayanan public yang lebih baik;
5. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban bagi seluruh warga masyarakat;
6. Menjamin keberlangsungan pembangunan yang berbasis pada agama dan budaya.

### **2.2. Perencanaan Kinerja Tahun 2021**

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan Rencana Kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam Rencana Kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran maupun kegiatan. Penyusunan Rencana Kinerja merupakan pedoman bagi penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Kecamatan Tomoni telah menyusun Rencana Kinerja Tahun 2021 meliputi

penetapan sasaran yang akan dilaksanakan berikut indikatornya, program dan kegiatan disertai indikator kinerja kegiatan. Kemudian selanjutnya Kecamatan Tomoni menyusun Perjanjian Kinerja, Perjanjian kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh Pimpinan Instansi dilingkup pemerintahan. Penyusunan Perencanaan Kinerja mengacu pada Dokumen Renstra Kecamatan Tomoni Tahun 2021-2026. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021, Dokumen Renja Tahun 2021 dan DPA Tahun Anggaran 2021. Kecamatan Tomoni telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dengan uraian sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Perjanjian Kinerja Tahun 2021**

<b>NO</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
<b>1.</b>	<b>Meningkatnya Kemampuan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan Tomoni</b>	<b>Survei Kepuasan Masyarakat</b>	<b>78</b>
<b>2.</b>	<b>Meningkatnya Capaian Kinerja dan Keuangan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan Tomoni</b>	<b>Nilai LAKIP</b>	<b>62</b>

Sumber : Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian

**Tabel 2.2**  
**APBD Perubahan Tahun 2021**

<b>SASARAN</b>	<b>PROGRAM DAN KEGIATAN</b>	<b>TARGET</b>	<b>PAGU</b>
<b>Meningkatnya Kemampuan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Kecamatan</b>	<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>	<b>100%</b>	<b>2,749,000</b>
	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>100%</b>	<b>2,749,000</b>
	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain	180 lembar	2,749,000
	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	<b>100%</b>	<b>358,179,877</b>
	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>100%</b>	<b>82,789,117</b>
	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	0,4 rasio	16,358,800
	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	12 Desa	66,430,317
	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>100%</b>	<b>275.390.760</b>
	Pembangunan sarana dan prasarana	100%	275.390.760
	<b>Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>	<b>100%</b>	<b>18,169,008</b>
	<b>Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah</b>	<b>100%</b>	<b>18,169,008</b>

	Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan	100%	18,169,008
	<b>Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>100%</b>	<b>69,152,307</b>
	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>100%</b>	<b>69,152,307</b>
	Fasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	100%	6,649,925
	Fasilitasi Ketentraman dan ketertiban umum	100%	46,688,355
	Koordinasi pendampingan desa diwilayahnya	4 dokumen	15,814,027
<b>Meningkatnya Capaian kinerja dan keuangan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan Tomoni</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>100%</b>	<b>3,892,275,460</b>
	<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>12,991,279</b>
	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	2 dokumen	5,156,588
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 dokumen	2,359,705
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2 dokumen	2,251,055
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 dokumen	3,223,931

	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>2,596,640,369</b>
	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	26 Orang	2,596,640,369
	<b>Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>2,002,140</b>
	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	100%	2,002,140
	<b>Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>26,030,000</b>
	Pelaporan pengelolaan retribusi daerah	100%	26,030,000
	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>43,040,000</b>
	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	26 Orang	30,000,000
	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	5 Orang	13,040,000
	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>518,990,000</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3 Unit	7,077,000
	Penyediaan Peralatan Rumah tangga	3 Unit	14,929,400
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3 Orang	48,916,800
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	31099 Lembar	14,986,800
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	120 Exp	6,120,000

	Fasilitasi Kunjungan Tamu	8500 ktk	160,805,000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	800 Kali	266,155,000
	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>133,634,696</b>
	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	140 unit	133,634,696
	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>404,287,776</b>
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500 Surat	28,231,416
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	108 Rek	64,656,360
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2 Jenis	0
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	21 org	311,400,000
	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>154,659,200</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	11 unit	96,934,200
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	44 Unit	20,260,000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3 Unit	37,465,000
	<b>JUMLAH</b>	<b>100%</b>	<b>4,340,526,537</b>

Sumber : Bagian Perencanaan dan Kepegawaian

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

---

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan pemerintahan yang telah diperjanjikan sebelumnya, maka sebagai wujud tanggungjawab Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menyusun Laporan Kinerja Tahun 2020 secara sistematis untuk menyajikan keberhasilan, hambatan serta permasalahan yang dihadapi dalam mencapai Sasaran Staregis.

Dalam melakukan evaluasi keberhasilan atau kegagalan capaian kinerja setiap sasaran, maka digunakan skala pengukuran 5 (lima) kriteria sebagai berikut :

**Tabel III-1**

#### **Skala Nilai Peringkat Kinerja**

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91 % ≤	Sangat Tinggi
2	76 % s.d 90 %	Tinggi
3	66 % s.d 75 %	Sedang
4	51 % s.d 65 %	Rendah
5	50 %	Sangat Rendah

**Sumber Data: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017**

#### **3.1. Capaian IKU Tahun 2020**

Pengukuran capaian kinerja yaitu mengukur tingkat capaian kinerja kegiatan yang dimulai dengan menetapkan indikator kinerja

kegiatan berdasarkan kelompok input, proses, output, outcome, benefit dan impact, menentukan satuan setiap kelompok indikator, menetapkan rencana tingkat capaian (target), mengetahui realisasi indikator kinerja kegiatan, menghitung rencana dan realisasi untuk mendapatkan persentasenya. Pencapaian terhadap IKU Kantor Kecamatan Tomoni akan digambarkan per Sasaran Strategis, sebagai berikut:

**Sasaran 1. Meningkatnya Kemampuan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan Tomoni**

Sasaran strategis ini merupakan salah satu upaya mencapai misi ke-4 sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2021-2026 yaitu **"Menciptakan Kepemerintahan dan Pelayanan Publik yang lebih baik"**, dan tujuan **"Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik"**. Sasaran ini didukung oleh Kantor Kecamatan Tomoni sebagai leading sector pelaksanaan pelayanan public di tingkat kecamatan.

**1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021**

**Tabel 3.1**

**Perbandingan Antara Target dan Realisasi Tahun ini**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian (%)	Predikat
1	Meningkatnya Kemampuan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan Tomoni	Indeks Kepuasan Masyarakat	80	90,65	113,3 %	Sangat Tinggi

Sumber :Seksi Pelayanan Umum

$$\text{Rumus : \% Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

**a. Analisis Capaian kinerja sasaran pertama sebagai berikut:**

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat dilihat persentase capaian mencapai 116,2% dari target yang direncanakan. Ini berarti hasil yangdicapai sudah baik. Hasil survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap pelayanan perizinan maupun non perizinan Tahun 2021 Kecamatan Tomoni berdasarkan 9 (sembilan) pertanyaan sesuai peraturan Menpan dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.

Untuk mendapatkan capaian kinerja pada indikator survei kepuasan masyarakat (SKM) dengan menggunakan kuesioner yang mengajukan permohonan pelayanan yang dibagikan pada setiap pengunjung yang datang pada loket pelayanan Kecamatan Tomoni, termasuk juga kuesioner indikator responden yang puas terhadap pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, menunjukkan realisasi baik dari target 78 atau melampaui target dengan nilai survei 90,65 (daftar terlampir). Sasaran pertama yaitu meningkatkan kinerja pelayanan publik di Kecamatan Tomoni.

Dalam meningkatkan kualitas pelayanan, diprioritaskan pada unsur yang mempunyai nilai terendah sedangkan unsur yang mempunyai nilai cukup tinggi harus tetap dipertahankan. Berdasarkan hasil tersebut maka diambil kesimpulan :

- 1) Nilai dalam kelompok paling rendah yang harus ditingkatkan adalah unsur kesesuaian persyaratan dengan jenis pelayanannya nilai **648**.

❖ **Faktor penghambat** kenapa kecamatan tomoni pada unsur kesesuaian persyaratan dengan jenis pelayanannya disebabkan karena belum adanya persyaratan yang jelas untuk setiap jenis pelayanan.

❖ **Solusi** untuk permasalahan unsur kesesuaian persyaratan dengan jenis pelayanannya adalah dengan membuat papan informasi yang berisi berbagai jenis pelayanan beserta persyaratannya, sehingga masyarakat yang datang bisa langsung melihat persyaratan untuk jenis pelayanan yang akan dilakukan.

2) Nilai kelompok yang paling tinggi yang harus dipertahankan pada unsur kewajaran biaya/tariff dalam pelayanan dengan nilai **818**.

❖ **Faktor pendukung** kenapa Kecamatan Tomoni pada unsur kewajaran biaya/tariff dalam pelayanan mendapat nilai tinggi, disebabkan karena memang pelayanan di kantor kecamatan tomoni tekhusus pelayanan kependudukan tidak dipungut biaya apapun (gratis).

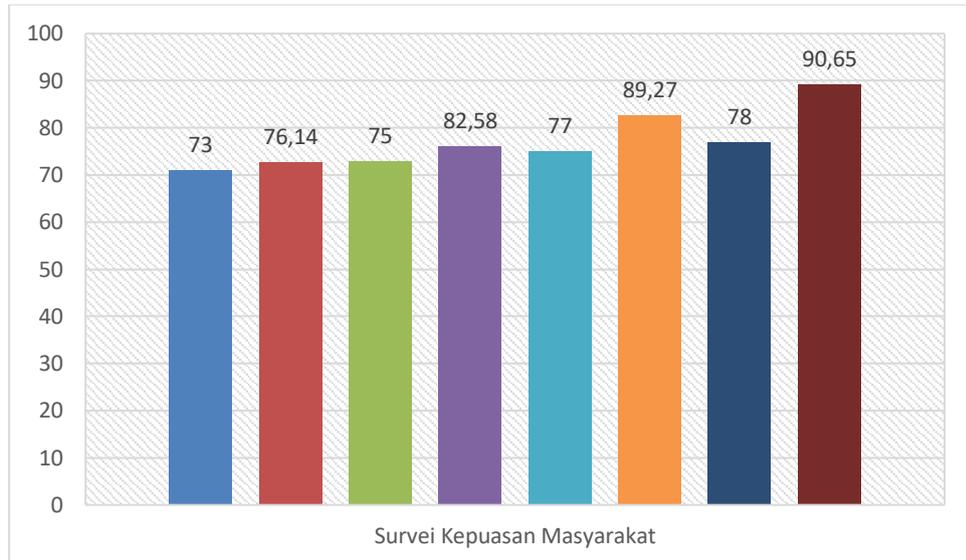
## 2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Beberapa Tahun Terakhir

Adapun perbandingan antara target dan realisasi dengan tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 3.2**  
Perbandingan Target dan Realisasi dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

NO	Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Predikat
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	2017	71	72,76	Sedang
2		2018	73	76,14	Tinggi
3		2019	75	82,58	Tinggi
4		2020	77	89,27	Tinggi
5		2021	80	90,65	Sangat Tinggi

Sumber : Seksi Pelayanan Umum



Keterangan Grafik :

Target 2018	Realisasi 2018
Target 2019	Realisasi 2019
Target 2020	Realisasi 2020
Target 2021	Realisasi 2021

Berdasarkan grafik diatas, maka dapat dilihat perbandingan capaian kinerja tahun 2018, tahun 2019 dengan tahun 2020 dan tahun 2021. Pada setiap tahunnya realisasi Survei Kepuasan Masyarakat mengalami peningkatan dan melampaui target yang telah ditentukan.

### 3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2021 dengan Target yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

**Tabel 3.3**  
**Perbandingan Capaian Kinerja Sampai Dengan 2021 Terhadap Target Renstra**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	RENSTRA
			2021	2021	
1	Meningkatnya Kemampuan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan Tomoni	Indeks Kepuasan Masyarakat	80	90,65	86

**Sumber : Seksi Pelayanan Umum**

Dengan melihat table capaian diatas, Indeks Kepuasan Masyarakat yang terealisasi hingga tahun 2021 sebesar 90,65 atau setara dengan 113,3% dengan Predikat Sangat Tinggi, Target nilai IKM pada akhir periode Resntra 2021-2026 yaitu 86, jika Realisasi Tahun 2021 dibandingkan dengan target IKM akhir periode Renstra, maka persentase capaian IKM sampai dengan tahun 2021 adalah 105,4%. Target ditahun 2022 memiliki peluang yang besar untuk dapat tercapai. Terkait indikator tersebut, diharapkan Kantor Kecamatan Tomoni untuk lebih meningkatkan segala aspek yang mendukung terwujudnya indikator tersebut seperti ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas, sarana dan prasarana serta sumber anggaran, sehingga nantinya sasaran yang akan dicapai yaitu meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan Tomoni dapat terwujud.

#### **4. Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan**

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja diatas dilakukan analisis pencapaian kinerja guna memberikan gambaran atau informasi yang transparan mengenai sebab peningkatan atau penurunan kinerja yang telah dilakukan.

Adapun hal yang mempengaruhi peningkatan kinerja yaitu sikap petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Adapun beberapa hal yang mempengaruhi kinerja pelayanan kepada masyarakat yaitu :

- a. Wabah Covid-19
- b. Sarana dan Prasarana yang kurang memadai

#### **5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Keterbatasan sumber daya sarana dan sumber daya manusia dalam menyampaikan informasi tentang syarat dan ketentuan dalam pelayanan perizinan dan non perizinan di Kecamatan Tomoni dapat terfasilitasi dengan adanya papan informasi, brosur dan banner yang ditempatkan ruang pelayanan di kecamatan dan desa/kelurahan sehingga dengan sendirinya masyarakat dapat langsung melihat informasi terkait syarat dan ketentuan pengurusan pelayanan perizinan dan non perizinan.

#### **6. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Adapun program dan kegiatan yang mendukung sasaran ini yaitu:

- A. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik :**

1) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat

a. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan

Pada tahun 2021 kegiatan perizinan hanya dilakukan sampai dengan bulan Juli, sejak tanggal 2 Agustus 2021 tidak ada lagi pelaksanaan perizinan di Kecamatan, menunggu peraturan yang baru terkait pelaksanaan perizinan, untuk sementara pelaksanaan perizinan seperti IMB dan yang lainnya diambil alih oleh kabupaten.

❖ **Hambatan :**

- a) Wabah Covid-19
- b) Belum ada peraturan yang baru terkait pelaksanaan pelayanan perizinan di kecamatan.

❖ **Solusi :**

- a) Tetap melaksanakan pelayanan administrasi perizinan dengan menerapkan protokol kesehatan Covid-19.

## **B. Program Pemberdayaan Masyarakat**

1) Koordinasi kegiatan pemberdayaan

a. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa

Target pada sub kegiatan ini adalah persentase keterwakilan perempuan dalam pelaksanaan musrenbang mencapai 40%. Musrenbang Kecamatan Tomoni dilaksanakan pada Bulan Februari 2021, masing-masing Desa/Kelurahan mengusulkan sebanyak 7 kegiatan prioritas dengan total 91 usulan. Setelah dilakukan musyawarah dan verifikasi oleh BAPPEDA, usulan yang terealisasi pada tahun 2022 sebanyak 34 kegiatan prioritas.

❖ **Hambatan :**

- a) Jumlah tamu undangan musrenbang dibatasi disebabkan karna Wabah Covid-19.
- b) Masih kurangnya partisipasi perempuan dalam menyampaikan usulan dalam musrenbang.

❖ **Solusi :**

- a) Tetap melaksanakan musrenbang dengan tetap mengikuti protokol kesehatan.
  - b) Memberikan pemahaman kepada tokoh perempuan terkait pelaksanaan musrenbang.
- b. Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan

Target dalam sub kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan PKK pada 12 Desa dan 1 Kelurahan di Kecamatan Tomoni. Kegiatan PKK untuk tingkat Kecamatan yaitu :

- a) Memfasilitasi administrasi PKK Desa/Kelurahan;
- b) Memfasilitasi Program / Kegiatan PKK Desa/Kelurahan;
- c) Pendampingan kegiatan pemberdayaan yang dibina oleh PKK Desa/Kelurahan.

Sepanjang tahun 2021 PKK kecamatan tomoni melakukan beberapa kegiatan diantaranya Lomba Kampung Organik, Lomba Dasawisma, Lomba Posyandu terintegrasi dan lomba senam lansia. PKK Kecamatan Tomoni melakukan beberapa kegiatan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan untuk menghindari penyebaran wabah *Covid-19*. Kegiatan PKK pada tahun 2021 sebagian besar berkaitan dengan penertiban administrasi PKK Desa/Kelurahan dan beberapa perlombaan baik ditingkat kecamatan maupun di tingkat Kabupaten.

❖ **Hambatan :**

- a) Wabah Covid-19.
- b) Sumber Daya Manusia terbatas.

❖ **Solusi :**

- a) Tetap melaksanakan kegiatan dengan tetap menerapkan Protokol Kesehatan Covid-19.
- b) Melakukan bimbingan teknis bagi pengurus PKK untuk peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia.

2) Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

a. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

Target dalam sub kegiatan ini adalah terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana di kelurahan. Pembangunan sarana dan prasarana yang dilaksanakan di kelurahan tomoni pada tahun 2021 adalah pembangunan drainase dan plat dekker.

❖ **Hambatan :**

- a) Wabah Covid-19.
- b) Terbatasnya anggaran.

❖ **Solusi :**

- a) Tetap melaksanakan kegiatan dengan tetap menerapkan Protokol Kesehatan Covid-19.
- b) Tetap melaksanakan pembangunan Sarana dan Prasarana dengan memaksimalkan anggaran yang ada.

**C. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**

1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

a. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

Target yang ingin dicapai dalam Rapat Koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimka)

adalah semua rekomendasi yang masuk dikecamatan 100 % harus diselesaikan. Kegiatan Rapat Koordinasi Forkopimka dilakukan apabila terdapat persoalan yang harus dibahas oleh lintas sektor se-Kecamatan Tomoni. Berikut adalah beberapa hal yang dibahas dalam rapat Forkopimka Tahun 2021 :

- a) Pertemuan dengan beberapa lintas sektor terkait peningkatan mutu dan pelayanan Kesehatan di Kecamatan Tomoni.
- b) Penanganan Covid-19 di Kecamatan Tomoni.
- c) Menindaklanjuti permasalahan pelaksanaan shalat Idul Fitri.
- d) Persiapan HUT Republik Indonesia ke 75 di masa pandemi Covid-19.
- e) Rapat Koordinasi Forkopimca dengan Bupati Luwu Timur.

❖ **Hambatan :**

- a) Pelaksanaan pertemuan dibatasi karena adanya pandemi COVID 19.
- b) Sinergitas antara FORKOPIMKA, pemerintah desa/kelurahan dan unit kerja lingkup Kecamatan Tomoni belum maksimal.

❖ **Solusi:**

- a) Tetap melaksanakan pertemuan dengan mengundang sesuai protokol kesehatan.
- b) Lebih meningkatkan koordinasi antara sesama unsur-unsur terkait.

**D. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**

- 1) Fasilitasi, rekomendasi dan koordianasi pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah

a. Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa

Target dalam sub kegiatan ini adalah terbentuknya Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa sehingga APBDes dapat dicairkan. Dalam pelaksanaannya, terdapat 12 Rancangan Peraturan Desa dan 12 Rancangan Peraturan Kepala Desa dengan total 24 Peraturan yang dibuat oleh Desa sebelum memasuki tahun anggaran 2022, Rancangan Peraturan tersebut kemudian diverifikasi oleh Tim Fasilitasi dan Evaluasi kecamatan lalu dibuatkan surat pengantar untuk dapat di teruskan dan diverifikasi kembali oleh Dinas PMD, setelah diverifikasi, Rancangan Peraturan tersebut kemudian disahkan sebagai Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa, sebelum APBDes dicairkan, Desa mengajukan Peraturan yang telah dibuat kepada Camat Tomoni untuk mendapatkan rekomendasi pencairan APBDes.

Pada pertengahan tahun berjalan akan terjadi perubahan anggaran sehingga desa akan membuat 12 Peraturan Desa (Perubahan) dan 12 Peraturan Kepala Desa (Perubahan). Sehingga total Peraturan terkait APBDes yang dibuat oleh desa selama 1 (satu) tahun adalah sebanyak 48 Peraturan. Pencairan APBDes dilakukan dalam 2 (dua) tahap selama 1 (satu) tahun anggaran.

❖ **Hambatan :**

- a) Keterlambatan Informasi terkait aturan penyusunan APBDes.
- b) Peraturan Bupati terkait pagu indikatif terlambat ditetapkan.

- c) Belum adanya peningkatan kapasitas SDM di kecamatan terkait kegiatan perencanaan desa.

❖ **Solusi :**

- a) Melakukan konsultasi dan koordinasi yang lebih intensif dengan pihak terkait.
  - b) Menggunakan estimasi anggaran tahun sebelumnya.
  - c) Pengusulan kegiatan bimbingan teknis perencanaan APBDes kepada SKPD terkait.
- b. Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Target dalam sub kegiatan ini adalah terselesainya pengaduan/konflik dalam masyarakat. Sebagian besar pengaduan masyarakat di Kecamatan Tomoni dapat terselesaikan pada tingkat desa sehingga tidak sampai ke tingkat kecamatan, pada tahun 2022 terapat 1 pengaduan yang di selesaikan hingga ke tingkat kecamatan, yaitu :

- a) Pengaduan sengketa tanah di Desa Rante Mario.

❖ **Hambatan :**

- a) Desa/Kelurahan tidak menyampaian dokumen penanganan pengaduan masyarakat yang sudah ditangani ke kecamatan.

❖ **Solusi :**

- a) Memberikan pemahaman kepada perangkat desa/kelurahan terkait penyampaian dokumen pengaduan masyarakat ke kecamatan
- c. Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya

Target yang ingin dicapai dalam kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan adalah Desa/Kelurahan tertib khususnya dalam hal administrasi. Kegiatan ini

dilaksanakan bertahap dalam IV (empat) triwulan, dimana pada setiap triwulan akan menghasilkan 1 (satu) dokumen hasil monitoring dan evaluasi. Sehingga secara keseluruhan, dalam 1 (tahun) kegiatan ini akan menghasilkan 4 dokumen hasil monitoring dan evaluasi.

❖ **Hambatan :**

- a) Sebagian perangkat desa belum memahami tupoksi masing-masing.
- b) Wabah *Covid-19* mempengaruhi pelaksanaan monev di desa/kelurahan.
- c) Kurangnya kesadaran dari aparat desa untuk hadir pada saat pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi.

❖ **Solusi:**

- a) Memberikan pembinaan kepada perangkat desa/kelurahan terkait tupoksinya masing-masing.
- b) Tetap melaksanakan kegiatan monev di desa/kelurahan dengan tetap mengikuti protokol kesehatan *Covid-19* dan Peraturan Pemerintah.
- c) Memberikan teguran secara lisan Maupun secara tertulis.

**Sasaran 2. Meningkatnya Capaian Kinerja dan Keuangan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan Tomoni**

Sasaran strategis ini merupakan salah satu upaya mencapai misi ke-4 sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2021-2026 yaitu "**Menciptakan Kepemerintahan dan Pelayanan Publik yang lebih baik**", dan tujuan "**Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan**". Sasaran ini didukung oleh Kantor Kecamatan Tomoni, kaitannya dengan Pelaksanaan Tata Pemerintahan dilingkup kecamatan.

Sebagai catatan untuk Nilai SAKIP sampai saat laporan ini disusun, Inspektorat Kabupaten Luwu Timur belum mengeluarkan Laporan Hasil Evaluasi LAKIP Tahun 2021, sehubungan hal tersebut maka pengukuran capaian Indikator Kinerja ini masih mengacu pada capaian tahun sebelumnya sebagai berikut:

**1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2020 dan tahun 2021**

Adapun perbandingan antara target dan realisasi pada tahun 2020 dan tahun 2021 terkait sasaran 2 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.4**  
**Perbandingan Antara Target dan Realisasi Tahun 2021 :**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2020	Target 2021	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Capaian 2020	Capaian 2021
1	Meningkatnya Capaian Kinerja dan Keuangan Penyelenggaraan urusan Pemerintah Kecamatan Tomoni	Nilai LAKIP	60	62	62,04 (B)	-	103,4%	-

Sumber : Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian

**a. Analisis Capaian kinerja sasaran sebagai berikut :**

Berdasarkan tabel diatas, maka untuk tahun 2021 belum dapat dilihat persentase capaian kinerja sasaran 2 (dua) karena masih menunggu hasil evaluasi yang dilakukan inspektorat Kabupaten Luwu Timur. Sedangkan untuk tahun 2020 nilai LAKIP Kecamatan Tomoni adalah 62,04 (B) dari target 60, ini berarti bahwa hasil yang dicapai sudah maksimal, melebihi target yang telah ditentukan, namun masih perlu ditingkatkan.

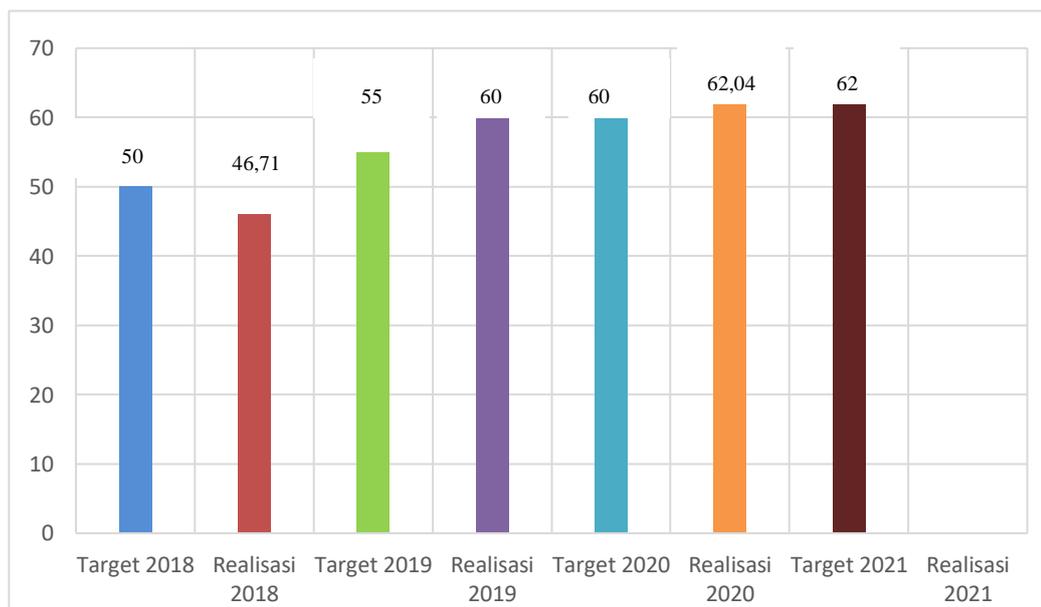
## 2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Beberapa Tahun Terakhir

Adapun perbandingan antara target dan realisasi dengan tahun-tahun sebelumnya dapat digambarkan pada tabel berikut ini :

**Tabel 3.5**  
Perbandingan Target dan Realisasi dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

NO	Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian %	Predikat
1	Nilai Score LAKIP (n-1)	2017	50	44,24	88%	Tinggi
2		2018	50	46,71	93%	Sangat Tinggi
3		2019	55	60	109%	Sangat Tinggi
4		2020	60	62,04	103%	Sangat Tinggi
5		2021	62	-		

Sumber :Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian



Berdasarkan grafik di atas, maka dapat dilihat perbandingan capaian kinerja tahun 2017 sampai tahun 2021 bahwa pada tahun 2018 Nilai Skor LAKIP yang diperoleh 46,71 dengan kategori C. pada tahun 2019 mengalami kenaikan dari

tahun sebelumnya dengan memperoleh nilai 60,00 dengan kategori B. Dan pada tahun 2020 kembali mengalami peningkatan dengan nilai 62,04 dengan Kategori B. sehingga dapat disimpulkan, perolehan nilai LAKIP kantor Kecamatan Tomoni mengalami peningkatan pada setiap tahunnya.

**3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi**

**Tabel 3.6**  
**Perbandingan Capaian Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Terhadap Target Jangka Menengah ( Renstra 2021-2026)**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	RENSTRA
			2020		
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja di Kecamatan tomoni	Nilai Score LAKIP (n-1)	60	62,04 (B)	67

**Sumber :Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian**

Berdasarkan capaian kinerja pada tahun 2020 yaitu Skor LAKIP 62,04 dengan kategori B. Nilai SAKIP yang diraih Tahun 2020 ini menunjukkan trend yang positif dimana dari tahun ke tahun nilainya cenderung naik.

**4. Analisis penyebab keberhasilan dan kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.**

Ada beberapa hal yang mempengaruhi keberhasilan capaian indikator tersebut yaitu :

- a. Telah dilakukan revisi renstra yang disesuaikan dengan hasil review RPJMD Tahun 2016-2021.
- b. Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Tomoni telah direvisi sesuai renstra tahun 2016-2021.
- c. Evaluasi kinerja eselon sudah ada.

## 5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

**Tabel 3.7**  
**Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya**

NO	Jabatan	Hasil Analisis Jabatan		Kondisi saat ini		
		Struktural	Pelaksana	Struktural	Pelaksana	
					PNS	Non PNS
1	Camat	1	-	1	-	-
2	Sekretaris Camat	1	-	1	-	-
3	Kasubag Perencanaan dan Kepegawaian	1	5	1	1	1
4	Kasubag Umum dan Keuangan	1	6	1	3	3
5	Kasi Pemerintahan Umum	1	3	1	1	1
6	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	1	3	1	2	1
7	Kasi Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	1	3	1	1	1
8	Kasi Pelayanan Umum	1	4	1	2	2
<b>JUMLAH</b>		<b>8</b>	<b>24</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>6</b>
<b>TOTAL</b>		<b>32</b>		<b>23</b>		

Sumber : Dokumen ANJAB dan ABK

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah dan syarat pemangku jabatan pelaksana pada Kantor Kecamatan Tomoni belum sesuai dengan hasil analisis jabatan Kecamatan Tomoni yang dibuat oleh Bagian Organisasi SETDA Kabupaten Luwu Timur karena sebagian jabatan pelaksana masih diisi oleh Non PNS (tenaga upah jasa).

## 6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Adapun program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian sasaran 2 (dua) yaitu meningkatnya pelayanan publik di Kecamatan Tomoni adalah :

## **A. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah :**

### **1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

#### **a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**

Target dalam sub kegiatan ini adalah tersusunnya 2 (dua) dokumen perencanaan Perangkat Daerah, dalam 1 (satu) tahun, terdapat 2 (dua) dokumen perencanaan yang disusun oleh Kantor kecamatan Tomoni, diantaranya adalah Renja Pokok dan Renja Perubahan.

#### **❖ Hambatan :**

- a) Keterbatasan data dan informasi dari masing-masing sub bagian dan kepala seksi yang di butuhkan dalam penyusunan dokumen perencanaan sehingga seringkali penyusunan dokumen perencanaan mengalami keterlambatan.
- b) Kurangnya koordinasi dalam penyusunan dokumen perencanaan.

#### **❖ Solusi:**

- a) Lebih meningkatkan koordinasi antara sesama unsur-unsur terkait dalam hal ini masing-masing Seksi dan Sub Bagian.

#### **b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD**

Target dalam sub kegiatan ini adalah tersusunnya 2 (dua) dokumen RKA-SKPD, dalam 1 (satu) tahun, terdapat 2 (dua) dokumen RKA-SKPD yang disusun oleh Kantor kecamatan Tomoni, diantaranya adalah RKA-SKPD Pokok dan RKA-SKPD Perubahan.

#### **c. Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA-SKPD**

Target dalam sub kegiatan ini adalah tersusunnya 2 (dua) dokumen DPA-SKPD, dalam 1 (satu) tahun, terdapat 2 (dua) dokumen DPA-SKPD yang disusun oleh

Kantor kecamatan Tomoni, diantaranya adalah DPA-SKPD Pokok dan DPA-SKPD Perubahan.

d. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

❖ **Hambatan/Kendala**

Dalam pencapaian program, terdapat beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi yaitu :

- a) Keterlambatan pengumpulan data untuk bahan LAKIP dari Kepala Seksi.
- b) Wabah *Covid-19* menghambat komunikasi Tim LAKIP Kecamatan.

❖ **Solusi**

Untuk menjawab permasalahan atau kendala yang dihadapi, maka telah dilakukan beberapa solusi yaitu :

- a) Menekankan kepada kepala seksi untuk segera menyiapkan bahan yang diperlukan dalam penyusunan LAKIP.
- b) Meningkatkan komunikasi Tim LAKIP dengan menerapkan protokol kesehatan *Covid-19*.

2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Target dalam sub kegiatan ini adalah terbayarkannya Gaji dan Tunjangan ASN di kantor kecamatan tomoni sebanyak 26 orang. Tidak ditemukan hambatan dalam pelaksanaan sub kegiatan ini di kantor Kecamatan Tomoni.

3) Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat Daerah

a. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Target dari sub kegiatan ini adalah barang yang disediakan untuk mendukung pelaksanaan kinerja di kantor kecamatan tomoni dilaksanakan dengan persentase 100%.

❖ **Hambatan/Kendala**

Dalam pencapaian sub kegiatan, terdapat beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi yaitu :

- a) Pengurus barang belum maksimal dalam menyediakan sebagian kebutuhan kantor (ATK).
- b) Inventarisasi barang milik daerah masih belum maksimal.

❖ **Solusi**

Untuk menjawab permasalahan atau kendala yang dihadapi, maka telah dilakukan solusi yaitu :

- a) Tetap memaksimalkan anggaran yang tersedia dalam melaksanakan program/kegiatan.
- b) Melakukan inventarisasi kebutuhan barang milik daerah pada setiap ruangan, persediaan setiap triwulan.

4) Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah

❖ **Hambatan/Kendala**

Dalam pencapaian sub kegiatan, terdapat beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi yaitu :

- a) Data Los dan Kios masih belum akurat;
- b) Masih sering terjadi tunggakan dalam pembayaran pajak retribusi;

❖ **Solusi**

Untuk menjawab permasalahan atau kendala yang dihadapi, maka telah dilakukan solusi yaitu :

- a) Melakukan pemutakhiran data kios dan los sebagai bahan dalam melakukan pemungutan pajak retribusi;
- b) Secara rutin melakukan penagihan dalam rangka memaksimalkan pemungutan retribusi.

5) Administrasi Kepegawaian perangkat Daerah

- a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya.

Target dari sub kegiatan ini adalah tersedianya pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya bagi pegawai di Kantor Kecamatan Tomoni sejumlah 26 orang. Tidak di temukan masalah didalam pelaksanaan sub kegiatan ini.

- b. Bimbingan teknis implementasi Peraturan Perundang-undangan

❖ **Hambatan/Kendala**

Dalam pencapaian program, terdapat beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi yaitu alokasi anggaran Bimbingan Teknis mengalami *Recofusing* anggaran akibat adanya wabah *Covid-19*.

6) Administrasi Umum Perangkat Daerah

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor;
- b. Penyediaan peralatan rumah tangga;
- c. Penyediaan bahan logistic kantor
- d. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
- e. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
- f. Fasilitasi kunjungan tamu;
- g. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD.

❖ **Hambatan/Kendala**

Dalam pencapaian program, terdapat beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi yaitu :

- a) Terjadi *Refocusing* Anggaran akibat adanya wabah *Covid-19* berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- b) Melakukan inventarisasi kebutuhan barang dan ATK setiap ruangan, persediaan setiap triwulan.

- c) Masih kurangnya penugasan dari pimpinan (perjalanan dinas luar daerah luar provinsi) akibat adanya wabah *Covid-19*.

❖ **Solusi**

Untuk menjawab permasalahan atau kendala yang dihadapi, maka telah dilakukan solusi yaitu :

- a) Tetap memaksimalkan anggaran yang tersedia dalam melaksanakan program/kegiatan.
- b) Melakukan inventarisasi kebutuhan barang dan ATK setiap ruangan, persediaan setiap triwulan.
- c) Memaksimalkan koordinasi dengan stakeholder.

- ❖ Adapun hal yang mempengaruhi keberhasilan capaian indikator tersebut yaitu koordinasi dan komunikasi yang baik antar pimpinan dan staf

7) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya

❖ **Hambatan/Kendala**

Dalam pencapaian sub kegiatan, terdapat beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi yaitu :

- a) Keterbatasan anggaran dan refocusing anggaran akibat wabah *Covid-19*
- b) Pengurus barang belum maksimal dalam menyediakan sebagian kebutuhan kantor (ATK).
- c) Inventarisasi barang milik daerah masih belum maksimal.
- d) Belum adanya sinkronisasi antara kebutuhan dan pembagian anggaran keuangan.
- e) Terlambatnya penginputan melalui Aplikasi pengadaan barang dan jasa.

❖ **Solusi**

Untuk menjawab permasalahan atau kendala yang dihadapi, maka telah dilakukan solusi yaitu :

- a) Tetap memaksimalkan anggaran yang tersedia dalam melaksanakan program/kegiatan.
  - b) Melakukan inventarisasi kebutuhan barang milik daerah pada setiap ruangan, persediaan setiap triwulan.
  - c) Melakukan sinkronisasi antara kebutuhan dengan perencanaan kegiatan.
  - d) Melakukan percepatan penginputan proses pengadaan barang dan jasa melalui aplikasi.
- 8) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
  - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
  - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

❖ **Hambatan/Kendala**

Dalam pencapaian sub kegiatan, terdapat beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi yaitu :

- a) Refocusing anggaran akibat wabah covid-19;
- b) Pengurus barang belum maksimal dalam menyediakan sebagian kebutuhan kantor (ATK).
- c) Inventarisasi barang milik daerah masih belum maksimal.
- d) Belum adanya sinkronisasi antara kebutuhan dan pembagian anggaran keuangan.

❖ **Solusi**

Untuk menjawab permasalahan atau kendala yang dihadapi, maka telah dilakukan solusi yaitu :

- a) Tetap memaksimalkan anggaran yang tersedia dalam melaksanakan program/kegiatan.

- b) Melakukan inventarisasi kebutuhan barang milik daerah pada setiap ruangan, persediaan setiap triwulan.
  - c) Melakukan sinkronisasi antara kebutuhan dengan perencanaan kegiatan.
- 9) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
  - b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

❖ **Hambatan/Kendala**

Dalam pencapaian program, terdapat beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi yaitu :

- a) Terjadi *Refocusing* Anggaran akibat adanya wabah Covid-19 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
- b) Belum adanya sinkronisasi antara kebutuhan dan pembagian anggaran keuangan.

❖ **Solusi**

Untuk menjawab permasalahan atau kendala yang dihadapi, maka telah dilakukan solusi yaitu :

- a) Tetap memaksimalkan anggaran yang tersedia dalam melaksanakan program/kegiatan.
- b) Melakukan sinkronisasi antara kebutuhan dengan perencanaan kegiatan.

- ❖ Adapun hal yang mempengaruhi keberhasilan capaian indikator tersebut yaitu pada umumnya kegiatan yang apa pada program Penunjang Urusan Permerintah Daerah berjalan dengan baik.

**a. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**

a. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

**3.2. Realisasi Anggaran**

Anggaran APBD untuk Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur tahun 2021 adalah sebesar Rp.4,340,526,537,- yang terdiri atas Belanja tidak langsung sebesar Rp. 2,596,640,369,- dan Belanja langsung sebesar Rp.1,743,886,168,. Sedangkan Realisasi anggaran tahun 2021 sebesar Rp.4,318,079,047,- dengan capaian **99,48%** yang terdiri dari realisasi Belanja pegawai sebesar Rp. 2,584,072,739,- dengan capaian 99,52% dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 1,734,006,308,- dengan capaian 99,43%. Secara rinci alokasi anggaran tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.8  
Realisasi Anggaran Tahun 2021

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET TRIWULAN I, II, III, IV <i>(BERDASARKAN ANGGARAN KAS)</i>	REALISASI ANGGARAN S.D 31 Desember 2021	Capaian (%)
			(Rp.)	(%)
(1)	(2)	(5)	(6)	(7)
				$(6/5*100)$
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA	3,892,275,460	3,870,558,247	99%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12,991,279	12,768,900	98.29
	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5,156,588	5,095,500	98.82
	- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2,359,705	2,308,500	97.83

	- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2,251,055	2,161,000	96.00
	- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3,223,931	3,203,900	99.38
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>2,596,640,369</b>	<b>2,584,072,739</b>	<b>99.52</b>
	- Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	2,596,640,369	2,584,072,739	99.52
	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>2,002,140</b>	<b>1,912,000</b>	<b>95.50</b>
	- Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2,002,140	1,912,000	95.50
	<b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>	<b>26,030,000</b>	<b>26,010,000</b>	<b>99.92</b>
	- Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	26,030,000	26,010,000	99.92
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>43,040,000</b>	<b>42,707,350</b>	<b>99.23</b>
	- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	30,000,000	29,800,000	99.33
	- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	13,040,000	12,907,350	98.98
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>518,990,000</b>	<b>518,853,748</b>	<b>99.97</b>
	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7,077,000	7,075,750	99.98
	- Penyediaan Peralatan Rumah	14,929,400	14,850,000	99.47

	Tangga			
	- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	48,916,800	48,911,400	99.99
	- Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	14,986,800	14,973,200	99.91
	- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	6,120,000	6,105,000	99.75
	- Fasilitas Kunjungan Tamu	160,805,000	160,796,500	99.99
	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	266,155,000	266,141,898	100.00
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>133,634,696</b>	<b>130,220,000</b>	<b>97.44</b>
	- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	133,634,696	130,220,000	97.44
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>404,287,776</b>	<b>400,731,783</b>	<b>99.12</b>
	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	28,231,416	28,223,000	99.97
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	64,656,360	61,108,783	94.51
	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	311,400,000	311,400,000	100.00
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>154,659,200</b>	<b>153,281,727</b>	<b>99.11</b>
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	96,934,200	95,559,727	98.58

	Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20,260,000	20,258,000	99.99
	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	37,465,000	37,464,000	100.00
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>2,749,885</b>	<b>2,749,000</b>	<b>99.97</b>
	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>2,749,885</b>	<b>2,749,000</b>	<b>99.97</b>
	- pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	2,749,885	2,749,000	99.97
	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>	<b>358,179,877</b>	<b>357,536,300</b>	<b>100</b>
	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>82,789,117</b>	<b>82,730,300</b>	<b>99.93</b>
	- Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	16,358,800	16,322,800	99.78
	- Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	66,430,317	66,407,500	99.97
	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>275,390,760</b>	<b>274,806,000</b>	<b>99.79</b>

	- Pembangunan Sarana dan Pra sarana	275,390,760	274,806,000	99.79
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>18,169,008</b>	<b>18,147,500</b>	<b>99.88</b>
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	18,169,008	18,147,500	99.88
	- Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	18,169,008	18,147,500	99.88
	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>69,152,307</b>	<b>69,088,000</b>	<b>99.91</b>
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah	69,152,307	69,088,000	99.91
	-Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	6,649,925	6,649,000	99.99
	-Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	46,688,355	46,633,500	99.88
	-Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	15,814,027	15,805,500	99.95
	<b>TOTAL BELANJA</b>	<b>4,340,526,537</b>	<b>4,318,079,047</b>	<b>99.48</b>

## **BAB IV PENUTUP**

---

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Tomoni Tahun 2021 ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, kebijakan, program dan kegiatan. Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur telah menetapkan 2 (dua) sasaran yang didasarkan pada tujuan, sasaran strategis dan target kinerja yang telah ditetapkan baik pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026, serta Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tomoni Tahun 2021-2026.

Secara keseluruhan persentase capaian dari 2 (dua) sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Tomoni Tahun 2021 hanya 1 sasaran yang bisa digambarkan capaian kinerjanya yaitu sasaran 1 (satu) survei kepuasan masyarakat dengan realisasi baik 90,65 dari target 80. Sedangkan sasaran ke 2 (dua) yaitu Nilai LAKIP belum bisa digambarkan capaiannya disebabkan penilaian LAKIP untuk Tahun 2021 baru akan dilaksanakan pada triwulan I tahun 2022. Pada tahun 2021 Kecamatan Tomoni telah menggunakan Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 1,734,006,308 dari pagu anggaran sebesar Rp. 1,743,886,168, dan belanja tidak langsung sebesar Rp. 2,584,072,739 dari total pagu sebesar Rp. 2,596,640,396, maka total realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Kecamatan Tomoni pada tahun 2021 adalah Rp. 4,318,079,047 dari pagu anggaran sebesar 3,340,526,537 atau setara dengan 99,48% dari anggaran indikatif yang direncanakan, hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Kecamatan Tomoni telah optimal.

Pada tahun 2021 terdapat beberapa kendala dan hambatan yang dihadapi dalam upaya pencapaian sasaran Kecamatan Tomoni meliputi :

1. Keterbatasan data. Data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan LAKIP baik data internal maupun eksternal masih sangat terbatas.
2. Adanya refocusing anggaran dampak pandemic Covid 19 sehingga beberapa program dan kegiatan juga perlu di refocusing.
3. Dengan adanya Permendagri 130 tahun 2018 Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan, terkait dengan kegiatan di Kelurahan merupakan kegiatan baru sehingga menyebabkan penyerapan anggaran kurang maksimal.
4. Belum samanya pemahaman mengenai materi LAKIP bagi pelaksana kegiatan sehingga dalam penentuan Rencana Kinerja terutama penetapan indikator kinerja masing-masing kegiatan belum sesuai dengan defenisi yang diuraikan dalam Pedoman Penyusunan LAKIP (Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Juknis PK, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas LKIP). Pada umumnya pelaksana kegiatan masih kesulitan dalam menentukan target indikator outcomes secara kuantitatif.
5. Pengembangan kelembagaan pada umumnya belum dilaksanakan secara optimal sehingga masyarakat yang ikut serta dalam pelaksanaan kegiatan hanya aktif pada masa-masa tertentu saja selama kegiatan itu berjalan (ada anggaran).

❖ Langkah Antisipatif :

1. Langkah-langkah antisipatif dalam upaya memecahkan masalah terutama lebih ditingkatkan koordinasi baik pada tingkat kabupaten maupun instansi terkait dan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan umum sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan.
2. Melakukan kajian-kajian perencanaan yang lebih akurat.
3. Mengintensifkan koordinasi internal program dan kegiatan.

4. Meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap perjanjian kinerja secara berjenjang.
5. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan sumber daya manusia melalui bimtek/diklat.
6. Menyiapkan sarana dan prasarana yang memadai.
7. Memaksimalkan kinerja dan pelayanan dengan sumber daya manusia yang terbatas.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur ini, diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja kepada pihak-pihak terkait.

Tomoni,      Februari 2022

CAMAT TOMONI

**CATUR DYAN SINTAWATI, SE.,MM**  
NIP. 19750901 200312 2006

## **LAMPIRAN – LAMPIRAN**

- i. PERJANJIAN KINERJA
- ii. LAIN-LAIN YANG DIANGGAP PERLU